

Dinamika Gerakan Sarekat Islam (SI) Cirebon dalam Kongres Al-Islam I 1922

Imas Emalia*

Abstract: The study of islamic movement in Indonesia during the Dutch colonization left some problematic issues for the development of the after-independent islamic educational system in Indonesia. The first Al-Islam congress in Cirebon, which was held by Sarekat Islam (SI), was intended to underline several problems faced by the Indonesian Muslims at that time, to flourish Indonesian unity, and to recommend the Colonial government to abolish the Teachers' Act in 1905. On the contrary, since 1932 the Dutch Colonial government issued Act on unauthorized schools (De Wilde Scholen Ordonantie) that legalize the goverment to eliminate schools run by Nationalist or Muslim Movements which were considered anti-government policy and unwilling to cooperate with the government.

Kata Kunci: Sarekat Islam (SI) dan kolonialisme.

STUDI sejarah pergerakan Islam di Indonesia bukan lagi sesuatu yang asing dalam tema besar sejarah. Banyak pakar yang menulis karyanya tentang sejarah pergerakan ini, mulai dari Sarekat Dagang Islam (SDI) 1911 sampai menjadi Sarekat Islam (SI) 1912 di Surakarta, Hajatoel Qoeloeb 1911 sampai menjadi Persjarikatan Oelama (PO) 1917 kemudian men-

*Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jl. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta Tlp. 7443329.

jadi Persatuan Umat Islam (PUI) 1945 di Majalengka, Muhammadiyah 1912 di Yogyakarta, *Djami'at Chair* 1901 di Jakarta, *Djami'atul Washilah* 1930 di Medan, Pergerakan Tarbijah Islamiah (PERTI) 1928 di Minangkabau, *Mathla'ul Anwar* 1905 di Menes, Banten, dan lain-lain. Pergerakan semacam ini bertujuan mengembalikan pola hidup yang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Arus pergerakan Islam ini karena pengaruh Wahabi yang dibawa Muh. ibn Abdul Wahab (1703-1787) di Saudi Arabia yang lebih diintensifkan oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan muridnya M. Rasyid Ridha (1856-1935) yang menitikberatkan pada ajaran agama murni dan mengharmoniskannya dalam kehidupan sehari-hari.¹ Munculnya organisasi pergerakan Islam pada masa itu selain untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia juga agar tetap terpeliharanya sendi-sendi agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun muncul perbedaan pen-

dapat dalam memahami ajaran agama, tetapi tidak mendorong perpecahan umat, melainkan rahmat dalam mewujudkan persatuan bangsa. Pada masa itu yang terpenting adalah bagaimana umat Islam maju dan selamat dari penjajahan kafir. Penderitaan rakyat akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda dimajukan untuk dibahas menjadi topik utama dalam pertemuan umat Islam Indonesia. Keprihatinan atas kemiskinan dan keterbelakangan umat menjadi tanggung jawab organisasi Islam saat itu. Karena antara Muslim yang satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, demikianlah ajaran Rasulullah saw. Konsep kesetiakawanan ini kemudian dipegang organisasi-organisasi Islam dan menjadi anjuran bagi umat untuk bersatu dan bekerjasama.

Sarekat Islam Cirebon Memperjuangkan Pendidikan

Sarekat Islam (SI) Cirebon yang didirikan pada 1913, setahun setelah organisasi ini berubah nama dari

SDI menjadi SI (1912), dipelopori R. Gunawan, wakil ketua SI hasil Kongres Yogyakarta pada 1914.² Pendirian SI Cirebon menarik perhatian rakyat di Karesidenan Cirebon sehingga berkembang pesat. Hal ini sesuai yang diteliti Korver di mana jumlah anggota SI Cirebon terbanyak kedua di Jawa setelah Surakarta pada 1913. Pada masa selanjutnya adalah ketiga di Jawa setelah Batavia (Jakarta) dan Surakarta. Masing-masing berjumlah 77 ribu di Batavia, 60 ribu di Surakarta, dan 40 ribu di Cirebon.³ Perkembangan pesat ini bertentangan dengan pendapat G. F. Pijper yang menganggap wilayah Cirebon dengan masyarakat Muslim tradisionalnya disebutnya sebagai pusat tarekat Qadiriyyah-Naqsyabandiyah, Syatariyyah, dan Tijaniyyah, sehingga organisasi seperti SI dan Muhammadiyah sulit mendapat anggota.⁴ Berikut laporan yang ditulis Pijper pada 1928 dan 1929:

...makam-makam dan tempat kramat tersebar di daerah Cirebon. Di pulau Jawa keta-

atan beragama hanya dapat dilihat dengan nyata di daerah Banten dan Cirebon. Daerah ini juga merupakan daerah pesantren, kiai-kiai mempunyai pengaruh di kalangan rakyat hingga sekarang. Kehidupan keagamaan masih bersifat tradisional. Aliran keagamaan baru, sampai sekarang tidak dapat berkembang di Cirebon, Muhammadiyah dan SI tidak dapat menginjakkan kakinya di sini, tetapi yang dapat adalah perkumpulan ulama-ulama yang beraliran kolot, yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Di bagian selatan, yaitu Majalengka, berdiri Perserikatan Ulama (PU)..⁵

Sepertinya Pijper sebagai pejabat pemerintah yang mengurus urusan Islam dan bumiputera memberikan kesimpulan yang salah dalam laporannya pada 1928-1929. Pandangannya yang melihat PU sebagai organisasi Islam tradisional juga patut dipertanyakan karena PU yang dipimpin KH Abdul Halim termasuk organisasi yang mendirikan madrasah dengan sistem klasikal dan kurikulum moderen, meski beliau ada-

lah pengikut mazhab Syafi'i yang banyak dianut kaum Ahlus Sunnah wal Jama'ah seperti kyai NU. Qadiriyah-Naqsyabandiyah⁶ merupakan tarekat yang ideologinya anti-pemerintah kolonial, karena dianggap kafir. Ideologi tarekat ini hampir sama dengan SI yang berusaha menjadi pembela rakyat kecil.

Sifat ortodoksi Islam SI merupakan daya tarik kuat bagi orang yang ingin menjadi anggotanya, apalagi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ditandai oleh kebangkitan umat Islam di Hindia. Selain itu para tokoh SI secara aktif membela masyarakat lemah, sehingga mempunyai potensi dukungan dari kalangan yang luas, terlebih masyarakat yang sedang membutuhkan pemimpin yang bisa mengayomi dan menjadi pelindung mereka, seperti halnya rakyat kecil yang mendambakan datangnya sang Ratu Adil yang umum dipercayai di pulau Jawa. Jawa Barat dikenal sejak dulu sebagai daerah penganut agama yang taat, bahkan ketika masa penjajahan yang penuh

dengan tekanan dalam tatanan kehidupan justru mendorong umat Islam semakin meningkatkan kegiatan keagamaannya. Saat itu SI tampil membela rakyat dari semua bentuk penghinaan, penindasan, dan tindakan sewenang-wenang pemerintah kolonial. Dengan sikap SI ini, rakyat merasa ada yang melindungi dan membela nasibnya.

Kasus seperti ini terjadi di Karesidenan Cirebon; Indramayu, Gebangilir, dan Lohbener. Daerah tersebut mayoritas penduduknya santri, terutama Gebangilir. SI dan Cina merupakan dua golongan yang saling bersaing. Dikatakan Korver bahwa terdapat persepsi yang negatif di antara masing-masing golongan itu. Hal ini disebabkan adanya cita-cita emansipasi Cina untuk menguasai Jawa dan pulau-pulau lainnya seperti yang dilakukan Belanda, sementara orang Jawa di mata Cina adalah bangsa yang harus menghormati dan merendahkan diri terhadap mereka. Laporan Asisten Residen Cirebon menyatakan: golongan Cina senantiasa me-

nunjukkan kelebihan-kelebihannya, dengan sikap yang sangat agresif dan nada angkuh terhadap orang Jawa, sementara orang Jawa tidak menerima dan menentang sikap-sikap golongan Cina tersebut. Dari benturan-benturan sosial seperti ini membuat jurang pemisah antara penduduk pribumi dan Cina semakin tajam dan meluas. Ketegangan tersebut yang melatarbelakangi ledakan-ledakan permusuhan dalam tubuh SI baik karena motif ekonomi maupun agama. Korver menyebut bahwa dalam kasus ini motif agama memainkan peran penting seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah di Jambi.

Di Cirebon kasus serupa terjadi pada 1913 dan 1914, yaitu bentrokan antara anggota SI dan penduduk Lohbener. Anggota SI yang terlibat dalam kerusuhan di Lohbener itu adalah anti Cina, mereka kebanyakan santri. Dalam suasana itu santri mengumandangkan teriakan *sabilillah*. Kejadian di Lohbener ini mengakibatkan permusuhan berantai terhadap

orang Cina yang ada di sekitar daerah tersebut.

Selain kerusuhan Lohbener juga terjadi di Gebangilir, ketika seorang penduduk setempat mendapat tantangan dari orang Cina sehingga menimbulkan kerusuhan yang hebat. Seratus warga Gebangilir secara sembunyi-sembunyi atau tidak menampakkan diri menyerang orang Cina di kampung Cina hingga terjadi pembakaran rumah dan lumbung padi milik Cina yang diperkirakan berisikan 2.000 ton padi. Hasil pemeriksaan kontrolir Sindanglaut dinyatakan enam orang penyebab kerusuhan ditangkap dan diamankan di Cirebon, dan lima orang Cina yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit di Cirebon. Kerusuhan ini melebar sampai ke Losari, Brondongan (Semarang), Bancar, Bulu, dan Tambakbaya (Afdeling Tuban). Akibat peristiwa itu penduduk Cina melarikan diri dan meminta perlindungan di Lasem dan Tuban. Namun di Tuban penduduk Cina diusir. Hal itu terjadi pada masa-masa awal berdirinya SI

sekitar 1913 dan 1914. Konflik ini juga terjadi di SI Bekasi yang menentang sistem upah lama yang diberikan kepada rakyat. Mereka menuntut kenaikan upah yang diberikan dari 11 sen menjadi 27 ½ sen untuk setengah hari menanam di sawah.

Korver menambahkan bahwa para pamong praja bersikap berbeda-beda terhadap SI. Ada yang menerimanya dengan rasa simpatik, tetapi ada juga yang menentangnya karena kekhawatiran akan kehilangan wibawa dan kekuasaannya. Hal ini terjadi di Cirebon yang bupatinya - waktu itu Panji Ariodinoto (1921-1923)- menentang keberadaan SI, bahkan menganggap pemimpin-pemimpin SI sebagai priyayi yang gagal⁷ karena tidak mampu memanggulkan tangan kekuasaannya terhadap rakyat sekitarnya. Antara 1924-1940-an tidak ada keterangan lagi tentang bagaimana sikap para bupati Cirebon terhadap perkumpulan SI ini.

Pada masa itu SI Cirebon justru memperlihatkan soliditas di antara sesama ang-

gotanya, seperti saling memperhatikan dan mengawasi tingkah laku sesamanya agar terhindar dari tujuh 'm' yaitu main (judi), madon (nafsu seks), minum (mabok), madat (candu), mangani (makan berlebihan), maling (mencuri) dan misuh (memaki).⁸ Konsep tujuh 'm' ini merupakan pokok bahasan Kongres SI di Surakarta pada 1913 yang disampaikan oleh Tjokroaminoto. Ia menekankan bahwa moral bangsa Indonesia tidak boleh rendah dan merendahkan diri akibat melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama. Bagi SI, Islam merupakan pengikat persatuan umat yang harus diperjuangkan. Untuk mewujudkan ini SI mendirikan majalah *Al-Islam*, sebagai propaganda Islam di kalangan SI dan rakyat Indonesia. Keberhasilan propaganda ini membuat banyak orang ke luar dari pekerjaannya yang majikannya orang Eropa dan Cina. Mereka khawatir tidak diterima menjadi anggota SI. Hal ini terjadi di Jakarta, Cirebon, Banyumas, Surakarta, Semarang, Rem-

bang, Madiun, Kediri, Pasuruan, dan Sumatera Selatan.⁹

Dalam rangka meningkatkan derajat rakyat Indonesia, SI bergerak memajukan pendidikan yang telah diusahakan perkumpulan Arab, Jamiat Khair. SI menekankan pelajaran bahasa Arab bagi siswa yang belajar di sekolah SI dan menyesuaikan dengan adat yang berlaku saat itu agar selamat di dunia dan akhirat, juga memberlakukan bahasa Belanda dan Melayu.

Pendidikan Islam sudah menjadi keinginan SI yang di sampaikan dalam rapat SI Cirebon yang dipimpin M. Djaid dan dihadiri SI Majalengka, Indramayu, Kuningan, Sumber, Clancang, Jamblang, Losari, Sindanglout, dan Kedawung. Rapat juga dihadiri organisasi-organisasi di luar SI seperti Paguyuban Pasundan, Pers seperti *Sin Po*, *Perniagaan Kong Po*, *Utusan Hindia*, *Neraca*, dan *Fadjar* serta dari Eropa dan Cina. Dalam rapat mereka menyatakan bahwa sesuai dengan tujuannya SI harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis dalam segala aktifitasnya. Bah-

kan SI Cirebon berhasil mendirikan sekolah HIS (Hollandsch Inlandsch School) sebagai sekolah dasar yang diperuntukkan bagi priyayi Jawa yang memakai pengantar bahasa Belanda dan kalangan SI sendiri ditambah dengan pelajaran agama Islam.¹⁰ Maklumat SI Cirebon yang dimuat koran *Fadjar*, 19 Juli 1922, menyatakan: *ba-hoewa Sarekat Islam Cheribon mempunjai azam (cita-cita.pen.) mendirikan seboeah sekolah jang akan membri pengadjaran pada moerid-moeridnja beralasan agama Islam dan seberapa bisa akan diichtiarkan soepaja sekolah itoe tiada lebih rendah dari HIS. Adapoen sijstem jang bakal dipakai dalam itoe sekolah jalah sijstem jang soedah terpandang paling baik boeat mendidik dan madoe-anak-anak Hindia dengan tanah aernja, jaitoe ka laoe diseboet dengan pendek sekolahan itoe berdasar Al-Quer'an atawa Sarekat Islam School met de Quer'an.*¹¹

Demikianlah tekad SI Cirebon untuk memiliki lembaga pendidikan yang sesuai

dengan cita-cita mereka untuk membangkitkan generasi muda Islam melalui pendidikan agama Islam. Sepertinya semangat untuk mendirikan sekolah agama Islam menjadi salah satu perjuangan SI secara umum dan SI Cirebon. Dengan sekolah-sekolah itu perjuangan SI untuk mencerdaskan umat Islam menjadi lebih sempurna karena pada dasarnya banyak organisasi keislaman yang menganggap bahwa sekolah umum sekuler yang didirikan pemerintah kolonial membawa misi untuk menjauhkan generasi muda Islam dari agamanya. SI segera menyusun kurikulum yang mengajarkan ilmu untuk mempertebal rasa keislaman anak didik. Untuk itu perlu dibicarakan dalam konferensi atau kongres besar yang diadakan SI Cirebon pada 16 Juli 1922 di Societeit Paroe-koenan. Dalam konferensi itu dibicarakan tentang perbaikan sistem pendidikan (*onderwysstestem*) sebagai berikut: *Stelsel onderwys jang ada di Hindia soeda teratoer oleh wetnja Belanda soeda dibikin satoe dasar penjoe-*

loeh dalam sekolah Belanda, jaitoe perasaan Cristen dimasoekkan jang sedalam-dalamnya atas perasaan Boemi Poetra Hindia, sedeng oemoemnja anak Hindia itoe jalah berigama Islam, djadi kalaw pendidikan itoe dibikin pokoknya kita orang kaoem islam banjak kababatan. Hal ini soeda dibitjarakan sama Directeur van Onderwijs en eeredienst. Dia djawab tjoe- ma kita melakoekan kewadji- ban sebagai negeri moesti mengadakan beamte dan lain-lainja, pokok dari pada onderwijs sijstem jang soeda dibitjarakan dalem itoe Conferentie dengan pandjang lebar terdapet seperti begini: Sekolah itoe memake dasar agama Islam (Al-Qur'an) soepaja kemadjoean anak-anak tentang lahir dan bathin bisa dapet bersama-sama. Sekolah itoe memberi peladjaran di waktu uitspanning (istirahat-penulis) tentang kunst (seni-penulis) kebangsaan, dan lain lain keradjinan oempama matjoel, mahat, meroet dll sebagainya soepaja di hari kelak tida merasa asing atawa segan mengerdjakan dan me-

liat pekerdjaan itoe sekolah mengadjar bahasa jang teroetama terpakai dalam pergaoelan di ini Hindia, jaitoe bahasa Melajoe. Sekolah itoe membri peladjaran bahsa dan pengetahoean Barat soepaja anak-anak lebi loeas pengetahoeannja tentang keadaan di doenja dan mempoe-njai pergaoelan dengan orang-orang jang berbahasa Ol landa. Itoelah pokok onderwijs sijstem jang setjara pendek sadja, dan sijstem ini tiada djaoeh berbeda dengan sijstem jang dikemoekakan oleh toean Dr. Niewenhuis.¹²

Hasil konferensi merumuskan secara utuh pendidikan seperti apa yang layak bagi anak-anak bumiputera. Lalu pendidikan kebangsaan, ketrampilan, bahasa Melayu, dan pengetahuan Barat dan bahasa Belanda. Sebagai organisasi pergerakan, SI menja di kendaraan politik bagi orang yang ingin menyuarakan ketidakpuasannya terhadap kemunduran umat Islam di Hindia Belanda. Untuk itu SI menjadi gerakan massa yang memiliki banyak pengikut. Sementara SI Cirebon sa-

ngat memperhatikan perkembangan masyarakat sekitarnya terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, ekonomi, politik kebangsaan, agama, dan pendidikan yang disesuaikan dengan syari'at Islam. Hal ini dibahas dalam rapat umum SI Cirebon yang ingin mendirikan sekolah dasar Islam seperti yang dipimpin M. Djaid. Sekolah itu bernama Sekolah SI Igama atau *Sarekat Islam School met de Qur'an*.¹³ Hal ini diungkap H. A. Salim dan H. Djuanda dalam pidato rapat umum SI dalam rangka persiapan perayaan 10 tahun berdirinya SI Cirebon yang dilaksanakan tepat pada bulan Maulid 1341 H.¹⁴ Sekolah SI Igama ini juga didirikan di Majalengka, Pekalongan, Pati, Kudus, Demak, Sukadana, dan Lampung.¹⁵

Selain pendidikan, SI Cirebon juga menyoroti ketidakadilan yang dialami rakyat kecil. Kepedulian SI Cirebon terhadap nasib penduduk setempat ditunjukkan melalui rapat-rapat umum, di mana para pemimpin SI Cirebon berpidato mengkritik pe-

merintah kolonial dan membela rakyat kecil. Hal ini tercermin dalam pidato wakil ketua SI Cirebon, Bratanata, yang mengkritik bahwa rakyat Hindia Belanda tidak diberi kesempatan oleh pemerintah kolonial untuk ikut mengatur pemerintah tetapi hanya menjadi pesakitan yang dibebani dengan banyak peraturan. Kutipan pidatonya: *tetapi saya ingin oeraikan sedikit bagaimana kedudukan kita di ini Hindia jang dipegang oleh pamarentahan dari bangsa jang pengetahoeannya tinggi, pande dan koeat, serta ada mempoenjai kamer-kamer (departement) boeat mengoeroes pamarentahan, tapi menjesel jang kita orang di sini belon dikasi kesempatan aken toeroet mengatoer.*

Pidato Bratanata itu sebenarnya bukan menginginkan agar pemimpin SI diangkat sebagai pejabat pemerintah, namun lebih sebagai luapan kemarahan dan kekecewaan SI karena *gementee Cheribon* atau pemerintahan kota Cirebon bertindak sangat tidak manusiawi terutama adanya pemungutan pa-

jak yang dibebankan kepada rakyat. Seperti yang diucapkannya dalam suatu rapat umum SI di Cirebon, yang dimuat dalam koran *Fadjar*, milik SI Cirebon: *Disini boekan djadi maksoed saja oelangkan hal itoe, atawa bitjaraan Volksraad dan lain-lain nja, hanja saja maoe oendjoek kedjelekkkan Gemeente Cheribon berhoeboeng dengan pemoengoetan belasting jang ditimpakan pada poendaknja rajat jang sanget melarat. Lebi djaoe speker oendjoek boekti dan tjonto tentang pendoeboek boemi-poetra di Cheribon jang mempoenja modal paling banjak satoe ringgit boeat mendjoeal saoeto, orang itoe dikenakan padjek f 36,- dalem satoe tahoen. Sementara toekang mendjait jang doeloe asalnja dikenakan padjek tjoe ma f 1,- ini taoen dikenakan f 20,16,- en banjak lagi jang bisa diondjoek kaloe kita maoe bilangkan satoe per sa-toenja. Tapi ini semoea pendoeboek bisa mendjerit-djerit sadja kerna pada waktoenja orang-orang itoe dikenakan padjek begitoe berat zonder*

*dioesoet dan dikasi taoe lebi doeloe.*¹⁶

Pidato Bratanata menunjukkan keberanian SI menyuarkan nasib rakyat kecil yang tertindas. Tuntutan itu akhirnya menjadi kesepakatan rapat untuk diajukan kepada pemerintah kota. Namun tampaknya tidak menjadi perhatian mereka bahkan tidak ada jawaban. Dengan demikian di sini dapat terlihat bagaimana SI Cirebon telah memberikan pengaruh yang cukup kuat dalam dinamika perubahan masyarakat. Sebagai organisasi yang dibentuk berdasarkan agama Islam tidak menjadikan SI meninggalkan permasalahan sosial-ekonomi umat. Ketidakadilan yang dirasakan rakyat menjadi tema perjuangan utama dalam Kongres Al-Islam untuk mengangkat harkat rakyat kecil, menentang dominasi ekonomi Cina dan juga praktik pajak yang sangat membebani rakyat.

Kongres Al-Islam I Tahun 1922 di Cirebon

Gagasan untuk membahas kondisi umat Islam di

Indonesia, mengantisipasi perkembangan sosial politik, dan pentingnya persatuan di antara mereka menjadi motivasi untuk melaksanakan Kongres Islam bagi seluruh organisasi Islam yang ada di Hindia Belanda. Gagasan persatuan dan kesatuan ini muncul di antara para pemimpin sentral SI. Gagasan ini kemudian ditawarkan kepada SI lokal yang mampu menjadi penyelenggara kongres. Pemilihan daerah Cirebon sebagai tempat kongres tentu tidak terlepas dari SI Cirebon yang memang memiliki banyak potensi. SI Cirebon merupakan cabang yang sangat potensial dilihat dari jumlah anggotanya.¹⁷ Dengan demikian sumber daya manusia yang ada dapat dijadikan kekuatan untuk mendukung Kongres Al-Islam I. Kongres Al-Islam I dilaksanakan untuk memupuk persatuan dan kesatuan umat Islam Hindia Belanda. Motivasi itu dilatarbelakangi oleh perasaan hilangnya rasa perlindungan dalam mengembangkan syiar agama dari pihak penguasa. Keinginan menentang penjajah Belanda ini

menumbuhkan harapan bahwa kongres ini dapat menyambungkan hubungan *ruhiah* dengan khilafah di Turki. Hal ini karena umat Islam Indonesia merasa bagian dari khilafah Islam tersebut. Walau pun secara lahiriyah berada di bawah kekuasaan Belanda yang sangat membatasi gerak dan kegiatan keagamaan Islam.

Kongres Al-Islam I terselenggara berkat peran tokoh SI HOS Tjokroaminoto dan H. Agus Salim. Kedua pimpinan SI ini menegaskan bahwa kongres di Cirebon ini berupaya agar tercapainya persatuan dan saling kerjasama di antara organisasi-organisasi keislaman dalam satu agama, yaitu Islam.¹⁸ H. Agus Salim terlibat secara intensif dalam kongres. Ia menunjukkan komitmen keislaman SI dalam menghadapi rongrongan anggotanya yang terlibat dalam organisasi berideologi komunis. Terlebih saat itu sedang dilakukan disiplin anggota SI untuk menyingkirkan unsur-unsur komunis dari tubuh SI.¹⁹ Untuk kelancaran kongres dibentuklah

panitia; ketua, Moerdoko, sekretaris, Bratanata, Sastrosoewirjo, Soejat, dan dibantu SI Cirebon. Undangan untuk peserta kongres disebarkan kepada semua organisasi dan perorangan, bahkan dimuat dalam surat kabar. Kongres berlangsung mulai 31 Oktober-2 November 1922 bertepatan dengan 9-11 Rabiulawal 1341 H, yang dihadiri 46 perkumpulan dengan 600 peserta dari berbagai organisasi Islam di Indonesia. Penyelenggaraan kongres bersamaan dengan peringatan hari Maulid nabi Muhammad saw, yang diperingati secara meriah oleh pihak Kraton Kesultanan Cirebon sehingga pada pembukaannya dihadiri lebih dari 5000 orang. Di antara organisasi-organisasi peserta kongres yang datang adalah SI, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama di Majalengka, Taswirul Afkar di Surabaya, dan MuSyawatul Ulama di Yogyakarta.²⁰ Kehadiran organisasi-organisasi Islam dalam kongres itu mengindikasikan bahwa seluruh umat Islam mengharapkan terwujudnya inte-

grasi di antara organisasi-organisasi tersebut. Walaupun dalam kongres tersebut banyak bermunculan perbedaan paham dan pandangan terhadap agenda acara seperti pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Indonesia yang harus tetap berkiblat pada Al-Qur'an dan Hadis.

Kongres juga membicarakan perkembangan dunia Islam di luar negeri (luar Hindia Belanda). Mereka membicarakan ancaman yang datang dari berbagai pihak yang selama itu berusaha untuk memperlemah negara-negara Islam dan umat Islam terutama adanya penjajahan oleh bangsa-bangsa non Islam, penyebaran agama Kristen, bahkan yang paling sering terjadi di Hindia Belanda adalah celaan dan hinaan terhadap ajaran Islam dan nabi Muhammad saw. Seperti kasus penghinaan terhadap nabi pada Januari 1918 dalam artikel yang ditulis dalam surat kabar *Djawi Hisworo* (terbit di Solo). Penulis yang bernama Martodarsono dan Djojodikoro yang mengatakan bahwa nabi Muhammad seorang

pemabuk dan seorang penghisap candu. Hal ini menimbulkan kemarahan umat Islam di beberapa kota termasuk di Surabaya dan Surakarta.²¹

Pokok-pokok yang dibicarakan dalam kongres adalah masalah pendidikan Islam, pengenalan terhadap organisasi-organisasi Islam, Majelis Ulama, Institut Islam, dan perjalanan naik haji. Bahkan juga dibahas semua keprihatinan yang diderita rakyat Indonesia yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak pemerintah kolonial sehingga membuat semua aktifitas pergerakan Islam berada dalam pengawasan pemerintah. Akhirnya, atas kesepakatan semua peserta, kongres berhasil mengambil keputusan tentang pendidikan dan pengajaran Islam yang dibacakan H. Agus Salim selaku pimpinan sidang. Rumusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Kongres seia sekata, bahwa pokok segala ilmoe agama ialah daripada al-koer'an dan hadis-hadis. 2. Kongres seia sekata bahwa empat imam moejtahidin itoe telah mene-

tapkan hoekoem-hoekoem agama menoeroet pendapatnja, setelah mempeladjarinya, setelah menjelidiki alasan-alasannya dalam koer'an dan hadis dengan peladjaran dan penjelidikan yang amat coekoep dan sempurna. 3. Congres seia sekata, bahwa oentoek mendjernihkan dan mendjelaskan ilmoe pengetahoean agama Islam itoe, dalam mempeladjarinya kitab-kitab agama amat oetamalah menjampaikan alasanja dalam koer'an dan hadis. 4. Congres seia sekata, bahwa mentafsirkan koer'an itoe tidak boleh dengan semaoe-maoenja seseorang sardja, melainkan oentoek memahamkan ma'na ayat-ayat koer'an perloelah beralat dengan pengetahoean pelbagai perkara yang berhubungan dengan ayat itoe.²²

Keputusan itu menyepakati bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Masalah penerjemahan kitab suci, diputuskan tidak semua orang berwenang menerjemahkannya ke dalam bahasa lain (Melayu/Jawa). Ia harus menguasai ilmu tafsir dan memahami

asal-usul ayat tersebut. Mereka sepakat bahwa kedudukan 4 mazhab dalam Islam adalah sah dan merupakan sumber kitab-kitab fikih (hukum) Islam yang dapat dipakai sebagai rujukan yang benar. Keempat mazhab itu adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali.²³

Kongres juga memunculkan mosi atau protes dengan terhadap *Ordonantie Goeroe* tahun 1905 yang dianggap oleh umat Islam sangat merugikan dan diskrimatif.²⁴ Rumusan mosi itu sebagai berikut:

Motie

Al-Islam Congres di Cirebon berkoempoel pada hari malam Kamis tanggal 2 November 1922 yang dihadiri oleh 46 wakil-wakil perhimpunan yang memadjoekan agama Islam dan 600 leden congres...

Setelah mendengar pematjaan Staatsblad 2 November 1905 no. 6363 dan Bijblad no. 550 yang mengikat peratoeran goeroe-goeroe agama Islam, dan oeraian-oeraian kesempitan bagi pengadjaran yang toem-

boeh daripada ketetapan-ketetapan peratoeran itu,...

Menimbang bahwa oeraian-oeraian jang pertama itoe sesoenggoehnja menghalang-halangi kaoem Islam istimewa oelama-oelama dan goeroe-goeroe melakoekan kewadjiban islamnja dengan leloeasa...

Achirnja menimbang bahwa oentoek mendjaga tertib keamanan oemoem telah tjoekeoplak dengan kelengkapan dan persiapan pemerintah, jaitoe politie, bestuur dan justitie;

Menjatakan pendapatnja, bahwa dalam masa ini tidak lajak dan tidak mestinja lagi diikat kebebasan pengadjaran agama; karena keamanan pengadjaran dan keamanan oemoem soedah bisa dan soedah memang diadakan pendjagaan jang sampai tjoekeoep;

Menjerahkan kepada pimpinan Congres akan mema'loemkan motie ini kehadapan pemerintah Hindia dan kehadapan Volksraad dengan permintaan soepaja ditjaboet atau diichtiarkan tertjaboetnja atoeran-atoeran

wet jang terseboet diatas ini dan jang mendjadi dasar atoeran itoe dalam Regeeringsreglement, soepaja madoelak kekoekaan negeri selangkah memberi kemerdekaan agama kepada ra'yatnya.²⁵

Dikeluarkannya mosi tentang *Ordonantie Goeroe* tersebut menunjukkan bahwa kongres mempunyai kepedulian terhadap kehidupan keagamaan umat Islam di Hindia Belanda. Mosi tersebut meminta agar pemerintah mencabut ordonansi guru tersebut sebagai bagian tuntutan akan kemerdekaan beragama bagi rakyat bumiputera. Tuntutan terhadap dicabutnya ordonansi guru juga dilakukan ulama-ulama dari Sumatera Barat.²⁶

Pemerintah tidak mengabulkan mosi tersebut, bahkan makin memperketat pengawasannya terhadap guru agama dan lembaga pendidikan milik organisasi keislaman. Sejak awal dapat kita ketahui bahwa kebijakan pemerintah untuk mengawasi lembaga-lembaga pendidikan Islam adalah bagian dari po-

litik Islamnya yang tidak ingin pergerakan Islam menjadi kuat dan membahayakan pemerintah Hindia Belanda.

Kesimpulan

Kajian pergerakan Islam di Indonesia mengukir luka bagi perkembangan sistem pendidikan Islam. Selain menyimpan rasa bangga bahwa bangsa Indonesia tetap semangat dalam menyuarakan panji Islam, perasaan tertindas antar sesama umat Islam menjadi pemicu bagi munculnya protes-protes sosial yang terjadi sejak awal abad ke-19. Bentuk-bentuk seperti itu dimunculkan untuk menuntut kebebasan dari semua penderitaan dan ketidakadilan.

Kongres Al-Islam I di Cirebon menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam Hindia Belanda. Juga untuk memupuk akar persatuan dan kesatuan umat Islam. Mosi kongres seperti ini tidak bisa memaksa pemerintah kolonial menghapus ordonansi guru tahun 1905. Bahkan sejak 1930-an kebijakan kolonial makin keras terhadap pihak-pihak yang di-

anggap tidak kooperatif dengan pemerintah. Beberapa organisasi dilarang dan tokoh-tokohnya ditangkap.

Situasi politik ini menunjukkan sikap reaksioner pemerintah dalam mengawasi lembaga-lembaga pendidikan. Pada 1932, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru yang memberangus sekolah-sekolah milik kelompok pergerakan nasional maupun Islam yang dianggap tidak mau bekerjasama dan anti kebijakan pemerintah, yaitu peraturan tentang sekolah-sekolah liar (*De Wilde Scholen Ordonantie*, 1932).

Kongres yang dihadiri puluhan perkumpulan Islam dan individu yang mewakili pesantren-pesantren merupakan momentum yang sangat penting bagi upaya mempersatukan umat Islam. Kongres sering dijadikan acuan dan semangat untuk terus berdakwah dalam segala lapangan kehidupan umat Islam di Hindia Belanda. Kongres juga dijadikan *ibroh* (pelajaran) untuk berbuat yang lebih baik seperti yang diupayakan

dalam pertemuan musyawarah untuk mencari kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, demi terlaksananya *amar ma'ruf nahi munkar* dan keberhasilan perjuangan organisasi Islam untuk menjadikan umat Muslim di Hindia Belanda lebih pandai, sejahtera, dan mengamalkan ajaran Islam secara murni dan menyeluruh (*kaffah*) berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

Catatan Akhir

1. L. Stoddard, *Dunia Baru Islam*, Jakarta, 1966, h. 297-298.
2. Pada 1921 SI secara resmi berubah menjadi Partai Sarikat Islam dan menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia pada 1930. Pada saat dibentuknya PSI baik di tingkat pusat maupun cabang maka SI lokal dan SI Central masih eksis. Dalam proses transformasi selama 1921-1927 struktur baru akhirnya disetujui di mana persetujuan pemerintah atas eksistensi PSI tidak diperlukan seperti halnya kepengurusan SI lama, karena sejak 1918 hak untuk berkumpul dan bersidang sudah diakui pemerintah, Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES, 1991, h. 114, 146, 147
3. A. P. E. Korver, *Sarekat Islam, Gerakan ratu Adil?*, Terj., Grafiti Pers, Jakarta, 1985, h. 196.
4. G. F. Pijper, *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, Terj. Tadjimah, UI Press, Jakarta, 1987, h. 80.
5. Laporan Pijper tentang perkembangan Tarekat Tijaniyah di Cirebon dan Jawa antara 1928-1929 dalam Pijper, *op. cit.*, h. 80.
6. Tentang ideologi tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah, baca Ajid Thohir, *Gerakan Politik Kaum Tarikat: Telaah Historis Gerakan Politik Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah-Naqsabandiyah di Pulau Jawa*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2002.
7. Korver, *op. cit.*, h. 17-199
8. *Ibid*, h. 52 dan Muhaimin A. G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001.
9. Korver, *op. cit.*, h. 66-67.
10. *Fadjar*, Surat kabar SI Cabang Cheribon No.151, 10 Juli 1922.
11. *Fadjar*, No. 158, 19 Juli 1922.
12. Verslag Conferentie SI Cheribon 16 juli 1922 di Societeit Paroe-koenan, *Fadjar*, 19 Juli 1922.
13. *Fadjar*, No.151, 10 Juli 1922.
14. *Fadjar*, No.152, 11 Juli 1922.
15. Verslag Conferentie SI Cheribon *Fadjar*, No. 158, 19 Juli 1922.
16. *Fadjar*, No. 152, 11 Juli 1922.
17. Korver, *op. cit.*, hal. 222-223.
18. Verslag van de wd. Adviseur voor inlandse zaken (R.A. Kern) van het 11e congres van de Centrale Sarekat Islam te Soerabaja, 8-10 aug 1924, dalam R.C. Kwan tes, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie: Bronnen Publikatie*, Medio 19

- 23-1928, Wolters-Noordhoff, 1978, h. 189-190.
19. Deliar Noor, *op. cit.*, h. 140.
20. Soewara Moehammadiyah, No. 12, 1 Desember 1922.
21. Deliar Noer, *op. cit.*, h. 143-144
22. A. Wardini, Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah Tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Indonesia, *Disertasi* pada IAIN Syarif Hidayatullah, 1989, h. 138-139.
23. Verslag van de wd. Adviseur voor inlandse zaken (R.A. Kern) van het 11e congres van de Centrale Sarekat Islam te Soerabaja, 8-10 aug 1924, dalam R. C. Kwantes, *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie: Bronnen Publikatie*, Medio 1923-1928, Wolters-Noordhoff, 1978, hal 189-190
24. Soewara Moehammadiyah, No. 12, 1 Desember 1922, melaporkan bahwa adanya keinginan untuk mencabut Ordonatie Goeroe 1905 yang dianggap membatasi gerak dakwah Islam organisasi-organisasi pergerakan Islam
25. A. Wardini, *op. cit.*, h. 142-143.
26. Deliar Noer, *op. cit.*, h. 195-198
- Daftar Pustaka**
- Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jawa Barat*, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1981
- Fadjar, Surat kabar SI Cabang Cheribon No.151, 152, 158 tahun 1922.
- Korver, A. P. E., *Sarekat Islam, Gerakan ratu Adil?*, Terj., Grafiti Pers, Jakarta, 1985.
- Kwantes, R.C., *De Ontwikkeling van de Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie: Bronnen Publikatie*, Medio 1923-1928, Wolters-Noordhoff, 1978,
- Muhaimin A. G., *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*, Logos, Jakarta, 2001
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1991
- Pijper, G. F. , *Fragmenta Islamica: Beberapa Studi mengenai Sejarah Islam di Indonesia Awal Abad XX*, Terjemahan Tudjimah, UI Press, Jakarta.
- Stoddard, L., *Dunia Baru Islam*, Jakarta, 1966
- Surat Kabar Soewara Moehammadiyah, No. 12 Th. 3, 1 Desember 1922.
- Thohir, Ajid, *Gerakan Politik Kaum Tarikat: Telaah Historis Gerakan Politik Antikolonialisme Tarekat Qadiriyyah-Naqshabandiyah di Pulau Jawa*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2002.
- Wardini, A., Kongres Al-Islam 1922-1941: Satu Telaah Tentang Integrasi dan Disintegrasi Organisasi-Organisasi Islam di Indonesia dalam Perkembangan Pergerakan Indonesia, *Disertasi* IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.